

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Era Globalisasi serta tuntutan reformasi yang semakin meningkat, peran Akuntansi sebagai alat pencatatan semakin dibutuhkan. Kepentingan itu tidak hanya diperuntukkan untuk pihak manajemen suatu entitas, tetapi juga untuk kebutuhan pertanggung jawaban (*Accountability*) kepada banyak pihak yang memerlukan, di dalam dunia bisnis (*Comercial*), Akuntansi telah berkembang seiring dengan perkembangan bisnis tersebut. Hal ini menyebabkan Akuntansi harus bisa menyesuaikan dan berkembang seiring dengan perkembangan dunia bisnis.

Akuntansi adalah sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi terbagi menjadi dua bagian utama yaitu akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis. Akuntansi Pemerintahan adalah suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut. Akuntansi bisnis adalah memberikan informasi keuangan atas transaksi keuangan yang dilakukan organisasi tersebut pada periode tertentu.

Persamaan Akuntansi Bisnis dengan Akuntansi Pemerintahan adalah memberikan informasi atas posisi keuangan dan hasil operasi, mengikuti prinsip – prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum, sama – sama mengembangkan

prinsip dan standar akuntansi, dan menggunakan sistem bagan perkiraan standar. Sedangkan perbedaannya adalah Akuntansi Pemerintahan tidak memiliki laporan Laba/ Rugi sebagai laporan keuangan, tetapi tetap ada laporan hasil operasi, Akuntansi Pemerintahan terdapat perkiraan anggaran sehingga ada jurnal untuk anggaran yang telah disetujui, pengeluaran modal dilaporkan baik dalam laporan neraca, maupun dalam laporan operasional, dan dalam Akuntansi Pemerintahan perkiraan “Modal” diganti dengan “Saldo Dana”.

Menurut permendagri 113 tahun 2014 pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah di bawah Pemerintah Kabupaten/Kota. Desa juga harus menerapkan pencatatan akuntansi Pemerintahan.

Menurut Erlina, Rambe Omar Sakti, dkk (2015:11) Dasar pencatatan akuntansi dalam pencatatan transaksi adalah *Cash Basis* dan *Accrual Basis*. *Cash basis* adalah mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan *Accrual Basis* adalah mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Menurut Permendagri No 113 tahun 2014 laporan keuangan desa yaitu :  
(1) Anggaran (2) Buku kas Umum (3) Buku Pajak (4) Buku Bank (5) Laporan

Realisasi Anggaran (LRA). Dalam buku Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Tahun 2015, laporan Keuangan desa terdiri dari : (1) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa (2) laporan Kekayaan Milik Desa. Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 siklus akuntansi terdiri dari 4 yaitu : 1) membuat anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), 2) transaksi yang timbul dari desa. Setelah anggaran pendapatan dan belanja desa disahkan, kemudian dilaksanakan. Pelaksanaan tersebut dibukukan disertai bukti-bukti berupa nota maupun kuitansi, 3) transaksi yang timbul dari desa kemudian dibukukan oleh Bendahara desa dengan membuat buku kas umum, buku kas harian pembantu pajak, buku bank dan neraca kas, dan 4) pembuatan laporan realisasi anggaran (LRA).

Fenomena yang terjadi bahwa akuntansi pada Pemerintahan Desa belum sepenuhnya memahami akuntansi secara baik dan benar. Peran dan tanggungjawab yang diterima oleh Desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga laporan keuangan Pemerintah Desa masih banyak data yang disajikan belum sesuai dengan realisasi dan terdapat kekeliruan dalam pelaporannya.

Kantor Desa Belutu terletak di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Sistem pencatatan akuntansi yang digunakan oleh Kantor Desa Belutu adalah *Cash Basis*. *Cash Basis* untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan

Realisasi Anggaran dan *Accrual Basis* untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang disajikan dalam Neraca.

Proses Akuntansi kantor Desa Belutu menggunakan komputerisasi dengan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) dan Prodeskel (Profil Desa dan Kelurahan). Di mulai dari membuat rencana anggaran yang telah di susun dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (lampiran 1), dalam pelaksanaan tersebut timbul transaksi. Transaksi tersebut di masukan ke buku kas umum (lampiran 2), transaksi yang terjadi tersebut dibuktikan dengan nota-nota. Buku kas umum adalah bagian dari penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara Desa yang wajib dipertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban. Dalam buku kas umum juga terdapat kolom kode rekening, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo.

Setelah menginput semua transaksi ke dalam Kas Umum, selanjutnya akan terprogram ke Buku Pajak (lampiran 3), Buku Bank (lampiran 4), selanjutnya Kantor Desa Belutu menyusun laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Dan Belanja Desa per semester (lampiran 5). Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Dan Belanja Desa menyajikan pendapatan dan Belanja Desa. Setelah membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa, kantor Desa Kampung Belutu membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan (lampiran 6). Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ini untuk mengetahui informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan Neraca. Neraca ini fungsinya

untuk mengetahui Laporan Kekayaan Milik Desa (lampiran 7), dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah Yang Masuk Ke Desa (lampiran 8).

Pendapatan yang diperoleh Desa Belutu berasal dari dana kampung dari APBN, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Kampung dan Bantuan Keuangan Kabupaten. Sedangkan Anggaran Pembiayaan Desa terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yaitu SILPA APBN dan SILPA ADK.

Berdasarkan data yang diperoleh, Kantor Desa Belutu tidak membuat jurnal umum dan tidak memposting ke buku besar. melainkan dengan mencatat bukti nota ke dalam buku kas umum bulanan, yang di catat ke dalam buku kas umum yaitu menerima setiap uang yang diterima untuk kepentingan Desa baik dari pendapatan transfer maupun Alokasi dana kampung dan juga mencatat setiap pengeluaran kas yang terjadi perbulannya. Masalah lain yaitu tidak membuat jurnal penyesuaian dan tidak dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap dalam Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 7).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan pada Desa Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Sri Indrapura”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana kesesuaian Penerapan Akuntansi Keuangan pada Desa Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan Prinsip Akuntansi Berterima umum”

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

- a) Untuk mengetahui apakah Desa Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dalam pencatatan akuntansi telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.
- b) Untuk mengetahui penyebab terjadinya masalah.

#### **2. Manfaat penelitian**

- a) Bagi Penulis, Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas di bidang akuntansi keuangan daerah khususnya mengenai pengelolaan keuangan desa.
- b) Bagi Desa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam penerapan Akuntansi Keuangan Desa yang sesuai dengan Prinsip Akuntansi berterima umum.
- c) Bagi Peneliti selanjutnya, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut di bidang yang sama.

### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dibagi menjadi 6 (Enam) bab, dengan rincian masing – masing sebagai berikut :

- BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan
- BAB II : Bab ini akan menguraikan teori yang digunakan sebagai pendukung dalam penulisan ini tentang Definisi akuntansi, siklus akuntansi, Desa, pengertian keuangan desa, sistem penganggaran desa, azas dan pengelolaan keuangan desa, siklus penyusunan laporan keuangan keuangan desa, dan laporan keuangan desa.
- BAB III : Bab ini mengemukakan tentang metode penelitian yang berisikan objek dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, dan juga cara pengumpulan data serta analisis data.
- BAB IV : Bab ini menjelaskan mengenai sejarah Kantor Desa Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Sri Indrapura, struktur organisasi, dan aktivitas Kantor Desa.
- BAB V : Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang penerapan akuntansi keuangan Desa.
- BAB VI : Merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan yang ditarik oleh penulis dan berbagai saran – saran untuk masa yang akan datang.